

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

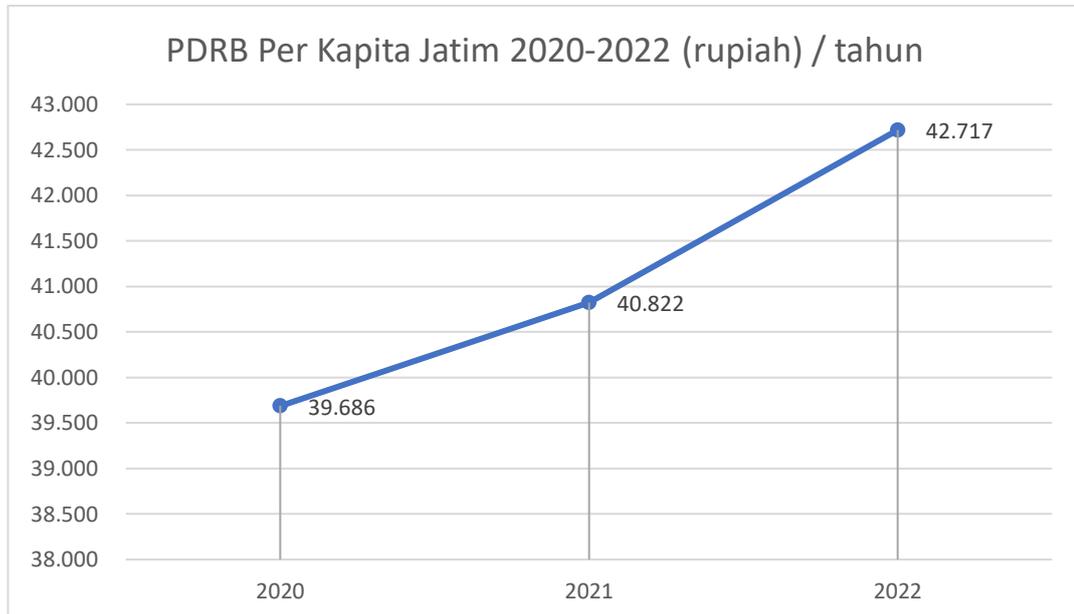
Pertumbuhan ekonomi adalah tumbuhnya kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih terkait dengan perubahan kuantitatif dan dapat ditinjau dari produk domestik bruto per kapita, baik nasional maupun regional. Produk Domestik Bruto (PDB) daerah merupakan indikator penting yang menentukan kondisi perekonomian suatu daerah selama periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam penentuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut kedepannya (Nuraini, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada dasarnya adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh per individual di suatu wilayah tertentu, atau nilai total produk dan jasa akhir yang dihasilkan tiap penduduk di suatu wilayah tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga tahun berjalan, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas harga yang berlaku untuk tahun tertentu pada tahun dasar yakni tahun 2010 (Hatta, 2021).

Pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 - 2022 dapat dikatakan cukup baik dengan adanya kenaikan secara terus menerus tiap tahun yang mana merupakan kabar baik setelah adanya efek pandemi covid-19 yang sedang gencar - gencarnya berimbas memperlemah kondisi ekonomi secara global di suatu daerah dan per individual di

dalam daerah tersebut yakni khususnya Provinsi Jawa Timur, seperti dipresentasikan dalam “Gambar 1.1 Grafik PDRB per Kapita Jawa Timur 2020-2022”.

**Gambar 1. 1 Grafik PDRB Per Kapita Jawa Timur 2020-2022**



Sumber : BPS Jawa Timur (diolah), 2023

PDRB per kapita juga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan penduduk setempat. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam pembangunan ekonomi daerah serta melibatkan peran aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah melalui otonomi daerah, dan percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah yang bertumpu pada sumber daya ekonomi dari daerah itu sendiri (Ristanti, 2015).

Selanjutnya pendapatan dan pengeluaran secara otonomi daerah merupakan hal yang berkaitan erat dengan adanya pembangunan ekonomi. Dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu beradaptasi dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berbagai daerah yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan potensi pendapatan untuk meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya adalah mengalokasikan sebagian besar investasi Belanja Modal (BM) untuk pengembangan sektor produksi daerah (Latifah, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. PAD merupakan salah satu dari ketiga “Pendapatan Daerah” yang berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) & Pendapatan Lainnya dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal (BM) merupakan salah satu dari keempat “Belanja Daerah” yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Lainnya.

PAD merupakan sumber pendapatan murni dari daerah dan merupakan modal utama daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meski tidak semua PAD mampu mendanai total belanja daerah, namun porsi PAD terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi indikasi kemandirian keuangan pemerintah daerah. PAD diharapkan menjadi aset utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, namun saat ini kondisinya masih kurang baik. Dalam artian proporsi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (TPD) masih relatif kecil (Syahrial & Sotuyo, 2014).

Ketika membicarakan tentang pendapatan daerah, pengeluaran daerah juga

memiliki peran tak kalah penting dalam perubahan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah. Pengeluaran daerah disini salah satunya dapat diukur dari Belanja Modal (BM). Belanja modal dapat dilihat sebagai investasi pemerintah daerah, namun investasi pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal adalah kualitas yang diharapkan, produksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada waktu yang ditentukan, kegiatan penanaman modal ditujukan untuk kepentingan bersama, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Pengeluaran investasi ini tidak boleh melebihi anggaran yang ditentukan (Antari & Sedana, 2018).

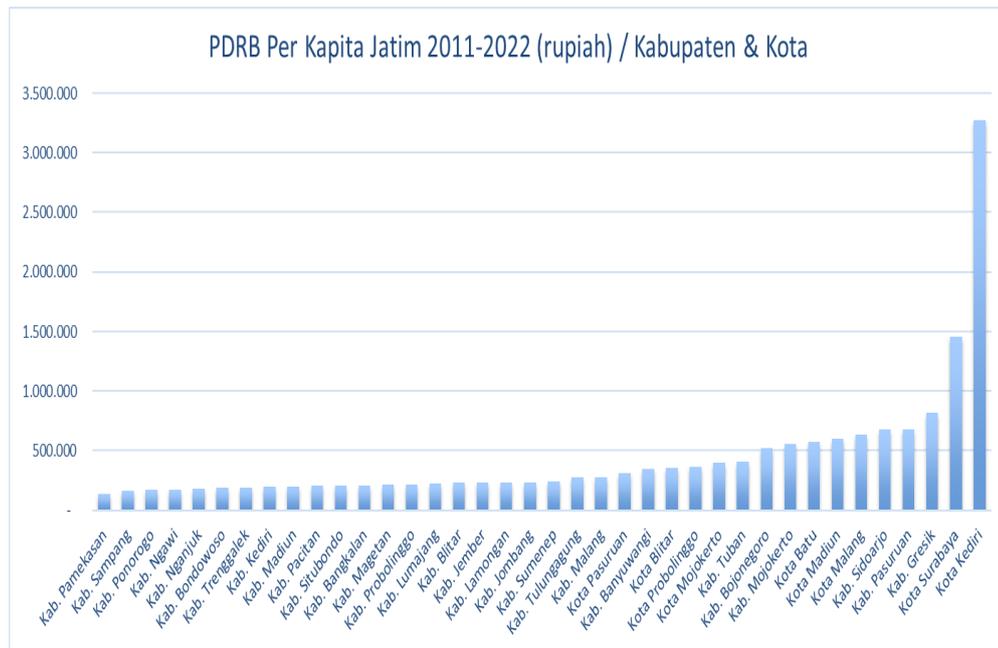
Teori Keynesian mengasumsikan bahwa intervensi negara dalam perekonomian memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan secara optimal. Lalu Pandangan teori Keynesian klasik adalah bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan ekonomi baik melalui kebijakan moneter (suku bunga dan jumlah uang beredar) atau kebijakan fiskal (pajak dan pengeluaran pemerintah) diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil. Itulah sebabnya di semua wilayah akan selalu ada campur tangan ekonomi dari pemerintah (Azwar, 2016).

Selanjutnya sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara tidak langsung juga Belanja Modal (BM) mampu mempengaruhi yakni mendorong kenaikan pembangunan dan juga pertumbuhan serta kestabilan ekonomi di suatu daerah tersebut. Semakin efektif dan efisien Belanja Modal yang dikeluarkan daerah dan bernilai positif tiap periodenya dengan realisasi pengelolaan yang baik maka mengindikasikan Belanja Modal akan memudahkan tiap individu (penduduk) mendapatkan fasilitas pendukung terutama sarana

prasarana publik untuk memaksimalkan nilai tambah produk dan jasa di suatu wilayah tertentu (Latifah, 2010). Hasil akhirnya akan terlihat kembali lagi pada kemajuan ekonomi daerah itu sendiri.

PDRB per kapita Jawa Timur tiap Kabupaten & Kota secara kumulatif dari total periode tahun 2011-2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo berada pada posisi 3 terbawah PDRB per kapitanya dari 38 Kabupaten & Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Pameksasan dan Kabupaten Sampang Seperti dituangkan dalam “Gambar 1.2 Grafik PDRB Per Kapita Jawa Timur Tiap Kabupaten & Kota Total 2011-2022”.

**Gambar 1. 2 Grafik PDRB Per Kapita Jawa Timur Tiap Kabupaten & Kota Total 2011-2022**



Sumber : BPS Jawa Timur (diolah), 2023

Rendahnya PDRB per kapita yang terjadi di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi yang baiknya diantisipasi dan menjadi pandangan penting bagi pihak yang terkait, meliputi

masih rendahnya fasilitas sarana prasana pendukung mewujudkan nilai tambah barang dan jasa tiap penduduk serta belum optimalnya integrasi berbagai program pendapatan dan pengeluaran secara otonom, maupun sumber-sumber yang lain, sebagaimana yang termuat dalam “Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo” tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo dengan berbagai kelebihan potensial sumber daya alam yang dimiliki terutama wisata alam dan budayanya diharapkan bisa menjadi Kabupaten yang memiliki PDRB lebih tinggi lagi setara dengan kabupaten / kota besar yang ada di Provinsi Jawa Timur ini seperti Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kota Kediri yang selama 12 tahun periode 2011-2022 menempati posisi 3 teratas secara kumulatif PDRB per kapitanya. Maka dari itu diharapkan akan terjadi pertumbuhan pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Ponorogo dengan pengoptimalan dan penyelarasan sinergi yang efektif dari pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Dengan adanya kenaikan secara positif tiap tahun baik PDRB per kapita, Belanja Modal, dan utamanya Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan bisa dirasakan juga benefitnya terhadap kesejahteraan tiap penduduk di Kabupaten Ponorogo.

Pendapatan Asli Daerah seperti diketahui secara tidak langsung juga mampu menjadi kriteria penentu dalam hal mendorong kenaikan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut (Antari & Sedana, 2018). Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif tiap periodenya dengan realisasi pengelolaan yang baik maka mengindikasikan PAD akan memudahkan tiap individu (penduduk) untuk memaksimalkan nilai tambah

produk dan jasa di suatu wilayah tertentu. Hasil akhirnya akan terlihat kembali lagi pada pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB per kapita sebagai kriteria pertumbuhan ekonomi daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening (studi pada Kabupaten Ponorogo). Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap PDRB per kapita, penulis menggunakan analisis Regresi Teknik Jalur (Path analysis) metode Kausal Step. Analisis regresi linier bukan hanya tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Namun terdapat variabel yang bertindak sebagai perantara hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi perubahan atau pembentukan variabel dependen disebut dengan variabel penghubung atau intervening (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Munawaroh, Desi Yuniarti, dan Memi Nor Hayati dari Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman tahun 2015 dengan judul "Analisis Regresi Variabel Mediasi dengan Metode Kausal Step (Studi Kasus: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2013)". Yang mana pembahasan secara garis besar dalam penelitiannya, belanja modal merupakan variabel yang diyakini dapat memediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Bruto per kapita di Kota / Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2013 (Munawaroh dkk., 2015).

Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik ingin

melakukan pembaruan menggunakan penelitian yang lebih update terkait tempo waktu yang diteliti dan sesuai fenomena riil terkini yang terjadi disekitar saat ini terlebih di 3 masa yakni sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi yang sering dikatakan dengan era new normal. Serta melakukan penelitian yang mengulik lebih dalam tempat daerah yang diteliti yaitu mengerucut hanya 1 Kabupaten yakni Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satu variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita serta satu variabel intervening yakni Belanja Modal (BM).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah rendahnya PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo yang mana berada pada posisi 3 terbawah PDRB per kapitanya dari 38 Kabupaten & Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis mengadopsi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) di Kabupaten Ponorogo.
3. Menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Ponorogo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Ekonomi Pembangunan dalam melakukan penelitian, khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) serta dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian awal bagi mahasiswa yang melakukan penelitian metode kuantitatif dengan teknik analisa jalur (Path Analysis).

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan penelitian mengenai gambaran / data indikator yang mempengaruhi PDRB per kapita di Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat dijadikan acuan oleh pihak terkait dalam pengambilan keputusan & kebijakan, untuk menambah nilai produk dan jasa yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan ekonomi

yang lebih baik.

### **1.4.3 Kegunaan Akademis**

Kemanfaatan akademik penelitian ini bisa menjadi alat referensi bagi peneliti selanjutnya nanti dengan menggunakan konsep dan landasan penelitian yang sama, yakni pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB per kapita sebagai kriteria pertumbuhan ekonomi daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.

### **1.5 Pembatasan Masalah**

Untuk fokus pada topik utama penelitian ini, perlu diterapkan batasan masalah. Dan juga karena keterbatasan waktu, tempat, dan data yang tersedia, penelitian ini dirancang terbatas dalam hal untuk mengkaji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Per Kapita Sebagai Kriteria Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten Ponorogo) pada tahun 2011-2022.